



Sebuah Kajian: **KETIMPANGAN GENDER DAN EKONOMI DI INDONESIA**

**dari Perspektif Perpajakan dan
Arus Uang Keluar yang Tidak Sah**



GAMBARAN UMUM

PENERIMAAN PAJAK



KEBUTUHAN BELANJA NEGARA



Penerimaan pajak setiap tahun masih belum mencukupi kebutuhan belanja negara, menghasilkan defisit anggaran yang terus ditutup dengan utang.

RP8.262,10 T
(MARET 2024)

Pertumbuhan Utang Negara

RP 7.776,7 T
(MARET 2022)



Indonesia
9% -10%

LAC dan Afrika
22% dan 18,2%.

Rasio pajak Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara berkembang lainnya.



Sumber pendapatan negara hilang akibat korupsi, pencucian uang, penyuapan, penghindaran dan penggelapan pajak, penyelundupan, penyalahgunaan jabatan, serta rekayasa pajak.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

=

SANGAT MINIM



PNBP hanya 22,6% dari penerimaan pajak di tahun 2022 meskipun sumber daya sangat melimpah



Anggaran pendidikan dan kesehatan belum mencukupi, mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan, tingginya angka stunting, dan keterbatasan layanan kesehatan di daerah terpencil.



Meskipun ada program perlindungan sosial, namun belum mampu menekan kemiskinan secara signifikan

Politik Fiskal dan Kemelut Era Pandemi

Pajak dan PNBP: Potensi Besar, Pencapaian Pas-Pasan



2020-2022

biaya untuk sektor lingkungan hidup
di Kemen LHK hanya mencapai

< 1% APBN

Tingkat Kepatuhan Pajak yang Rendah



Karyawan **73,65%**

Korporasi **57,28%**

WP-OP **42,75%**

Penghindaran Pajak



Illicit Financial Flows



Korupsi dan Pencucian Uang yang Menggerogoti APBN



Mengobrol Insentif Pajak untuk Penyelamatan Investasi

meskipun investasi tahun

2020= Rp826,3 T

dampaknya pada penciptaan
lapangan kerja tetap RENDAH.



Penanaman Modal Asing justru
terjadi di sektor-sektor yang padat
teknologi, seperti industri logam
dasar dan kimia, yang tidak
memerlukan tenaga kerja dalam
jumlah besar.

Utang Besar untuk Menutupi Borok APBN

Rasio pembayaran utang Indonesia
terhadap penerimaan mencapai

369% di 2020

jauh melampaui rekomendasi dari
International Debt Relief (IDR)
sebesar

92-167%

dan rekomendasi IMF
sebesar

90-150%



Keberpihakan Negara dan Penegakan Hukum yang Lemah

➤ Insentif untuk
Korporasi Bermasalah

➤ Kebijakan Tax
Amnesty Tanpa
Tindakan Lanjutan

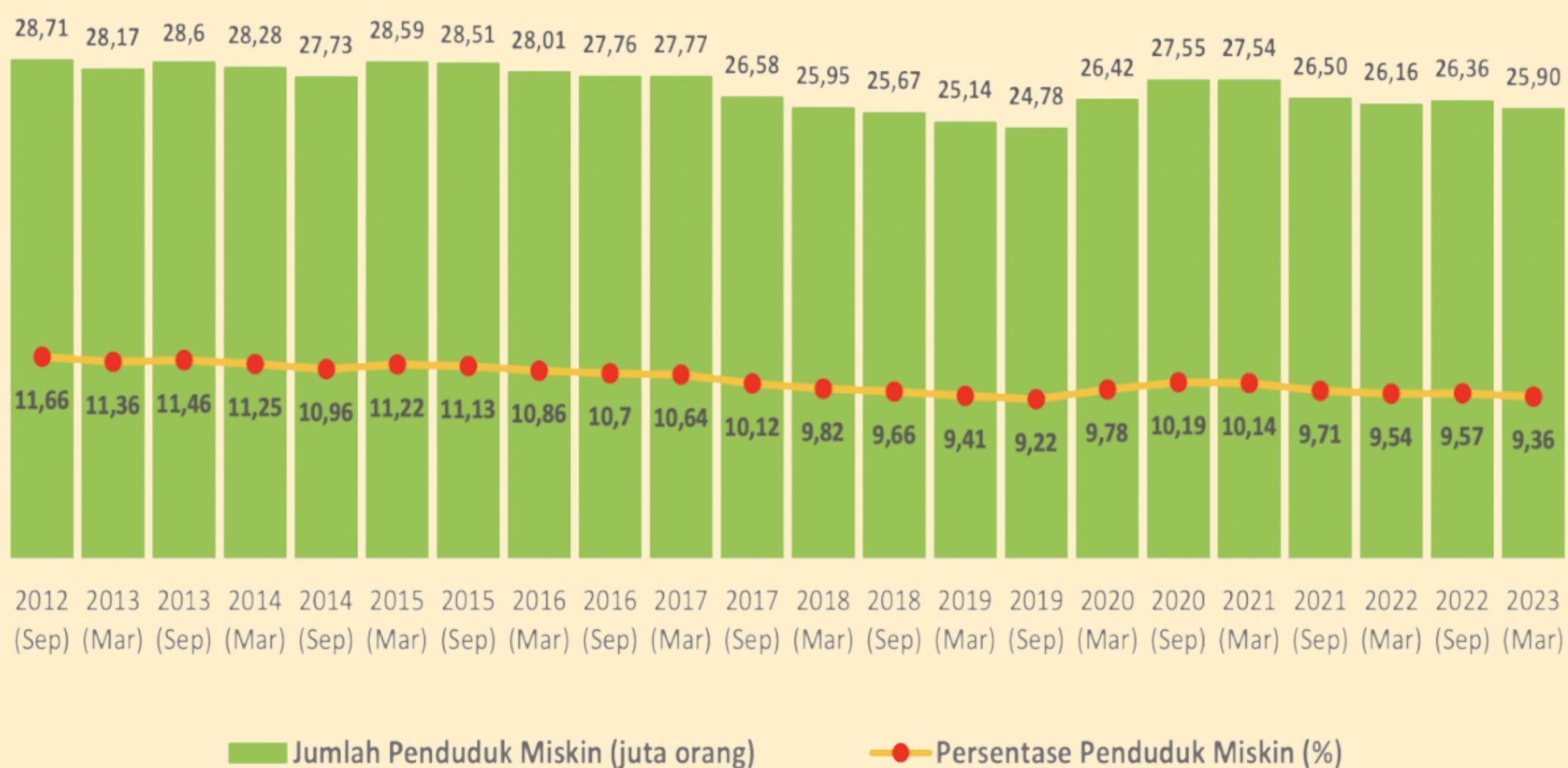
Pemberian Izin
Eksplorasi Sumber
Daya Alam

Ancaman Kriminalisasi
Terhadap Masyarakat

BEREBUT REMAH-REMAH LAYANAN NEGARA MELALUI APBN

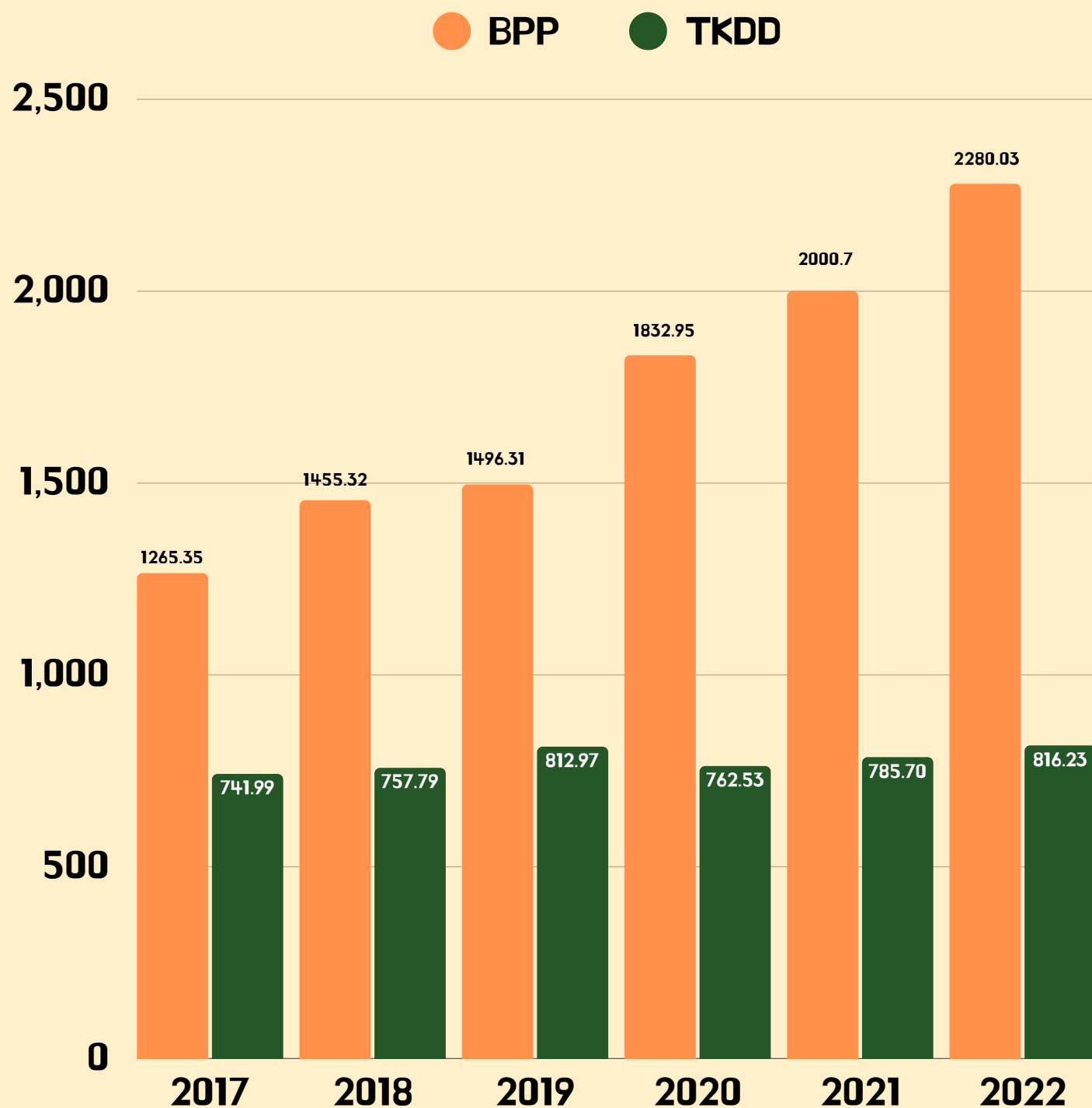
➤ Gambaran Kemiskinan, Ketimpangan Ekonomi dan Gender di Indonesia

Perkembangan tingkat kemiskinan September 2012 sampai dengan Maret 2023



➤ Ketimpangan Alokasi Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Vs Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)



Global Gender Gap Report selang 2017-2022:

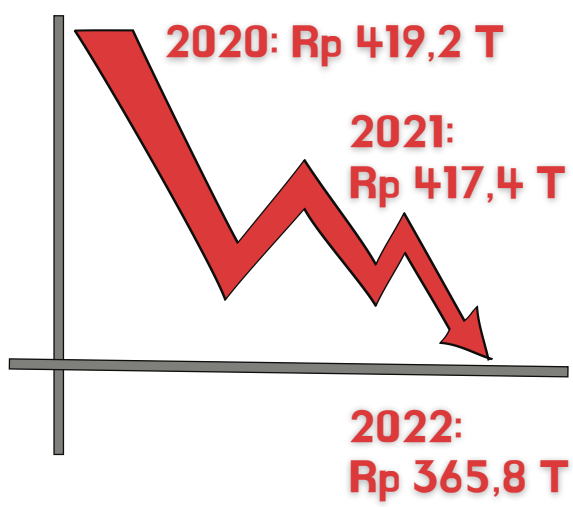


Indonesia berada
pada rangking
84 dari 144
negara.

➤ Kualitas Pelayanan Publik yang Rendah

Anggaran Infrastruktur

Anggaran infrastruktur terus meningkat tiap tahun, tapi...



Anggaran Bidang Pendidikan

dialokasikan rata-rata

20% setiap tahun

melalui BPP dan Transfer ke Daerah (TKDD)

2019, alokasi turun 3,74% menjadi Rp 429,5 T.

Belum cukup untuk mencapai standar pendidikan nasional. Hanya dipenuhi oleh <50% sekolah.

Anggaran Bidang Kesehatan

Belanja kesehatan rata-rata 5-6% dari APBN per tahun dianggap kecil untuk mengatasi masalah kesehatan yang besar.



Meski anggaran terus meningkat, **capaian indikator kesehatan masih rendah**, khususnya dalam:

- rasio tenaga kesehatan,
- Health Care Index,
- Wellness Index.

Anggaran Bidang Perlindungan Sosial (Perlinsos)

Belum efektif menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.



- Program tidak tepat sasaran,



- berfokus pada bantuan jangka pendek,



- korupsi yang menghambat pencapaian tujuan jangka panjang dan peningkatan SDM.

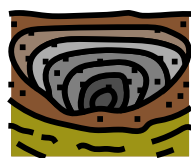
Alokasi dana lingkungan

Anggaran kecil dibandingkan banyaknya kasus lingkungan.

2021: 58 kasus kriminalisasi terkait lingkungan

terutama di

- sektor pertambangan (52%)
- kehutanan/perkebunan (34%).



3.033 lubang bekas tambang batubara

tak direhabilitasi, yang telah menyebabkan

143 anak meninggal

termasuk 37 di Kalimantan Timur.

Anggaran pertahanan dan keamanan

Alokasi APBN untuk dana pertahanan dan keamanan terus meningkat.



Kritik terhadap Kementerian Pertahanan:

Transparansi rendah, potensi konflik kepentingan, dan peringkat akuntabilitas kinerja yang rendah.



Penegakan hukum:

Kurang profesional dan transparan, laporan masyarakat sipil mencatat kekerasan dalam penanganan unjuk rasa.



Indeks Persepsi Korupsi:

Skor rendah mencerminkan minimnya kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.

DAMPAK POLITIK FISKAL TERHADAP PEREMPUAN DAN EKOSISTEM HIDUPNYA

➤ Perempuan dalam Politik Perpajakan Di Indonesia

Kebijakan pajak yang mengatur penerimaan dan distribusi dana pembangunan berdampak langsung pada kesejahteraan dan perlindungan perempuan.

Kebijakan perpajakan Indonesia saat ini tidak responsif terhadap isu gender, memperbesar ketidakadilan ekonomi dan gender.

Perlu kebijakan perpajakan yang lebih responsif gender untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan.

➤ Akar Diskriminasi Berbasis Gender dalam Kebijakan Perpajakan di Indonesia

Demografi dan Pembangunan Pajak

2022: 275,77 juta penduduk.

Jumlah wajib pajak terdaftar di Indonesia

2021: 49,82 juta
2002: 2,59 juta



Kebijakan Perpajakan dan Diskriminasi Gender

- Kebijakan perpajakan Indonesia tidak responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan perempuan, dipengaruhi oleh undang-undang diskriminatif, khususnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

- Prinsip paternalistik dalam perpajakan menganggap laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan kepala keluarga, mengabaikan kontribusi perempuan sebagai pencari nafkah.



Peraturan Perpajakan Indonesia yang Mengatur Penerimaan Pendapatan Negara yang Bersumber dari Pajak

UU No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh)

- PPh: Menyumbang 13,7% dari penerimaan pajak negara (Rp 78,29 triliun).
- UU PPh memaksa perempuan menikah membayar pajak lebih tinggi.
- Kurangnya data segregasi gender mengabaikan kontribusi perempuan.
- Satu NPWP per keluarga, umumnya atas nama suami.
- Kebijakan perpajakan paternalistik, laki-laki dianggap penghasil utama.
- Perempuan dengan NPWP terpisah terikat pada sistem suami-istri.

UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

- UU HPP 2021 bertujuan meningkatkan penerimaan pajak.
- Tidak mempertimbangkan dampak pada perempuan.
- Memperkenalkan lima lapisan tarif pajak.
- Pengusaha menggunakan taktik legal untuk mengurangi pajak.
- Diperlukan insentif pajak bagi perempuan terkait tanggung jawab keluarga.

Pajak Penghasilan Pribadi dalam UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008

- Kesatuan Ekonomi: Keluarga sebagai unit pajak, menggabungkan pendapatan anggota.
- Suami Sebagai Pembayar Pajak: Suami adalah kepala keluarga dan wajib pajak utama; istri tidak otomatis.
- Pendapatan Istri: Digabung dengan suami, kecuali melapor terpisah.
- Beban Pajak: Tunjangan tidak diterima istri yang bekerja, meningkatkan beban pajak keluarga.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) UU No 42 Tahun 2009

- PPN Membebani Perempuan: PPN pada barang konsumsi dan kebutuhan dasar tidak dikecualikan, membebani perempuan miskin.
- Keuntungan untuk Industri: Pengecualian PPN lebih menguntungkan industri makanan.
- Kenaikan PPN: Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% menambah beban ekonomi perempuan.
- Reformasi Diperlukan: Perlu sistem perpajakan yang peka gender dan partisipasi perempuan.

➤ Dampak Politik Fiskal terhadap Perempuan dan Ekosistem Hidupnya

Program pendidikan yang tidak meningkatkan kualitas pendidikan perempuan

Anggaran pendidikan **20%**



tetapi Human Capital Index Indonesia: **0,54 (2020)** di bawah rata-rata ASEAN.

16,09% perempuan 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah, dibandingkan **11,65%** laki-laki: **5,35%** perempuan buta huruf vs. **2,57%** laki-laki.

2005-2016: 425 kasus korupsi di sektor pendidikan merugikan negara Rp 1,58 triliun, **berdampak pada alokasi dana untuk pendidikan perempuan miskin.**

Program kesehatan yang tidak memperbaiki masalah kesehatan perempuan dan anak

Indeks Keamanan Kesehatan: **Indonesia peringkat 45**

dengan skor 50,8 dari 194 negara

Hanya 0,47 dokter per 1.000 penduduk peringkat ke-139 dari 194 negara



Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai **305 per 100.000** kelahiran hidup

Program Perlindungan Sosial yang tidak menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dan gender

Human Development Index: Indonesia peringkat **112 dari 193 negara**

Jaring Pengaman Sosial (JPS) **menciptakan ketergantungan dan gagal atasi kemiskinan.**

Perempuan di pedalaman kesulitan akses program perlindungan sosial karena persyaratan rumit.

Perlindungan Lingkungan dan Ruang Hidup Perempuan



58

kasus kriminalisasi pada 2021,

52%

terjadi di sektor pertambangan

3.033

lubang bekas tambang batubara terbuka, mengakibatkan **143 kematian anak.**



Alih fungsi lahan menyebabkan perempuan kehilangan akses pangan dan pekerjaan, beralih menjadi buruh tani.

Investasi yang Tidak Berdampak pada Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan Perempuan

Total investasi mencapai **Rp826,3 T**

melebihi target **Rp817,2 T**

Penyerapan tenaga kerja hanya **235.401** hingga **384.892** orang dari **153.349** proyek.



Tingkat pengangguran **7,07%** (2,68 juta orang), jauh dari target **4,5%-5,0%**.



REKOMENDASI

Memperkuat sistem pengelolaan pajak yang adil, akan mengurangi ketimpangan gender dan ekonomi yang dihadapi perempuan kelompok-kelompok masyarakat miskin. **Untuk itu negara harus:**

- menggunakan uang hasil pajak untuk perempuan dan masyarakat miskin, misalnya untuk subsidi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan sosial lainnya.
- tidak menggunakan uang hasil pajak untuk proyek-proyek yang justru menggusur rakyat dan menghilangkan mata pencaharian sehingga terus memiskinkan mereka.
- tidak mengambil utang baru karena biaya utang membebani APBN dan merampas jatah untuk kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan.
- pajak barang mewah dinaikkan dan diperketat pelaksanaannya, sementara PPN untuk konsumsi bahan dasar dan kebutuhan perempuan ditiadakan.
- Pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek pajak meskipun perempuan bergabung dalam NPWP keluarga, tetap mengakui perempuan sebagai subjek pajak berpenghasilan.



Co-funded by
the European Union

Publikasi ini diproduksi dengan pendanaan bersama dari Uni Eropa. Isinya sepenuhnya merupakan tanggung jawab Aksi! dan tidak mencerminkan pandangan dari Uni Eropa.